

Kesenjangan Sosial Masyarakat Urban di Balik Pembangunan Infrastruktur Kota (Studi di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya)

Isnaeni Qurotun Nisyak¹, Pambudi Handoyo², & Sugeng Harianto³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 12 Juni 2023

Revised: 12 Agustus 2023

Accepted: 28 Agustus 2023

Keywords:

Kesejahteraan Sosial;

Masyarakat Urban;

Pembangunan Infrastruktur.

ABSTRACT

The city of Surabaya is the second largest city in Indonesia after the city of Jakarta. Therefore the management and development of infrastructure also runs like a capital city. Various sectors to support the economy can be found in Surabaya. So that many people who come from villages urbanize to cities. Thus, the existing infrastructure in the City must be managed properly. However, in reality, infrastructure development such as public space in the city of Surabaya has created social inequality for the people living around the area. For example, in the South Surabaya area, namely Wiyung District, you can find lots of fast food such as McDonald's, KFC, Burger King, Pizza Hut, Mixue, and several other fast food restaurants. In addition, some of the land is managed by other parties. In the next few years, other elite centers will be built. On the other hand, indigenous people who live in rural areas feel the impact of social inequality due to uneven development. This clearly shows the difference in social status of the indigenous people of the region. This study uses a qualitative research method by observing, and supporting data obtained from journal articles and news. The purpose of this study was to find out how the form of social inequality experienced by the people around the Wiyung sub-district, Surabaya, was caused by the development of public infrastructure. The results of this study indicate that people in rural areas feel the impact of social inequality caused by the development of public infrastructure such as differences in social status, lack of jobs, lack of social welfare, and the emergence of a shift in people's lifestyles to become consumptive.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Oleh sebab itu pengelolaan dan pengembangan infrastruktur juga berjalan layaknya ibukota. Berbagai sektor untuk penunjang perekonomian banyak ditemukan di Surabaya. Sehingga banyak masyarakat yang berasal dari desa melakukan urbanisasi ke kota. Dengan demikian, infrastruktur yang ada di Kota harus dikelola dengan baik. Namun kenyataannya, pembangunan infrastruktur seperti ruang publik yang ada di Kota Surabaya menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Contohnya pada wilayah Surabaya Selatan, yaitu Kecamatan Wiyung yang banyak dijumpai fast food seperti McDonald, KFC, Burger King, Pizza Hut, Mixue, dan beberapa restoran cepat saji lainnya. Selain itu beberapa tanah dikelola oleh pihak lain yang beberapa tahun kedepan akan dibangun pusat-pusat elit lainnya. Di sisi lain, masyarakat asli yang menempati daerah perkampungan merasakan dampak kesenjangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Hal ini secara nyata menunjukkan perbedaan status sosial dari masyarakat asli wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan melakukan observasi, dan data pendukung didapatkan dari artikel jurnal, dan berita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dari kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar kecamatan Wiyung Surabaya yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perkampungan merasakan dampak dari kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur publik tersebut seperti perbedaan status sosial, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya kesejahteraan masyarakat, dan timbulnya pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadi konsumtif.



© 2023 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Isnaeni Qurotun Nisyak,

Email: isnaeniqurotun.21011@mhs.unesa.ac.id

How to Cite: Nisyak, I.Q., Handoyo, P., & Harianto, S. (2023). Kesenjangan Sosial Masyarakat Urban di Balik Pembangunan Infrastruktur Kota (Studi di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya). *Sosio e-Kons*, 15 (2), 206-211

PENDAHULUAN

Adanya pembangunan infrastruktur ditandai dengan adanya peningkatan jumlah penduduk disuatu wilayah dan meningkat dengan pesat dari tahun ketahun. Hal tersebut dapat dilihat dari angka pertumbuhan penduduk yang mendiami suatu kota, terlebih itu adalah kota besar. Secara umum pertumbuhan penduduk yang terjadi di suatu kota didasari oleh tiga hal yang terdiri dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun dalam hal ini, pertumbuhan penduduk di kota banyak dipengaruhi oleh arus urbanisasi dan melakukan migrasi yang besar, sehingga memperbanyak jumlah penduduk di wilayah tersebut (Hidayanti, 2021). Terjadinya migrasi yang ada di kota memiliki keterkaitan erat dengan dengan kebijakan pembangunan yang ada di kota. Saat ini pengertian urbanisasi juga dikenal sebagai pergeseran stuktur sosial dan ekonomi serta transformasi permukiman yang seluruhnya telah berubah menjadi perkotaan (UNDESA, 2021). Selain itu salah satu identitas yang menjadi identik pada perkotaan adalah adanya pertumbuhan dan aktivitas perekonomian yang memadahi. Sehingga kota mampu memberikan banyak lapangan pekerjaan baru dan sumber penghasilan baru bagi masyarakat.

Namun secara kenyataannya, pembangunan yang ada di Indonesia tidak berlangsung secara merata. Hal tersebut menjadi bukti bahwa di negara Indonesia masih terdapat ketidakadilan dalam mensejahterakan rakyatnya (Prasasty, 2021). Padahal secara hakikatnya, dengan adanya pembangunan yang berlangsung memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Tapi hingga saat ini, kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi masyarakat sulit dicapai. Dapat dilihat dari fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyak ditemukannya masyarakat yang tereksekusi secara sosial (Fathy, 2019). Dalam pancasila yang tertuang dalam sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi terbalik dengan kondisi nyata yang ada di lapangan bahwa masih ditemukan kesenjangan sosial yang tajam antara si kaya dan si miskin. Pengelolaan infrasturktur yang tidak merata menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas yang lemah akibat dari adanya perencanaan pembangunan yang tidak inklusif.

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur juga memiliki pengaruh besar pada kesenjangan pembangunan ekonomi. Sehingga nantinya ikut mempengaruhi kesejahteraan antar setiap wilayah (Sukwika, Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia, 2018). Permasalahan yang dibahas mengenai ketimpangan ini pada dasarnya diperoleh dari ketidakmerataan pembangunan dan juga pendapatan dari masyarakat, khususnya pada masyarakat kota. Permasalahan ketimpangan sosial ini sering terjadi di kota-kota besar seperti pada Ibukota Jakarta dan wilayah sekitarnya. Begitupun pada Kota Surabaya, dimana kota surabaya juga menjadi kota terbesar kedua setelah ibukota. Sehingga banyak ditemukan orang-orang yang menjadi masyarakat asli dari wilayah tersebut ataupun dari luar wilayah itu mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya.

Berdasarkan sejarahnya, perkembangan sektor industri di Kota Surabaya diawali dari daerah Tanjung Perak, dan semakin lama melebar pada wilayah sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Hal ini membuat beberapa wilayah mengalami alih fungsi lahan yang semula dari pertanian berubah menjadi industri dan perumahan (Sadewo & Legowo, 2019). Seiring berjalannya waktu, kota Surabaya mengalami perubahan tata ruang wilayah dan pembangunan infrastruktur baru juga banyak dilakukan. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak tertinggal dari wilayah-wilayah kota yang lainnya. Namun berdasarkan fakta di lapangan, dibalik pembangunan infrastruktur yang baik tersebut memberikan dampak bagi wilayah-wilayah kampung perkotaan disekitarnya. Hal ini memunculkan ketimpangan sosial antara mereka yang menjadi kaum elit dan masyarakat yang berasal dari kelas sosial menengah ke bawah. Dapat dibuktikan bahwa wilayah Surabaya, khususnya pada Surabaya selatan yaitu disekitaran Kecamatan Wiyung banyak dijumpai infrastruktur publik yaitu restoran fast food seperti McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Mixue, Excelso, Starbuck, dan restoran fast food lainnya. Pada barisan ini juga terdapat perumahan elit seperti perumahan Babatan Pratama dan Royal Residence. Sedangkan di lain sisi, dihadapkan langsung dengan wilayah perkampungan dari masyarakat perkotaan disana. Jika digambarkan, daerah perkampungan diapit oleh dua kawasan elit. Bagian kiri dihuni oleh restoran fast food yang berjejer serta

kawasan perumahan elit. Sedangkan bagian kanan terdapat mall dan apartemen dari Pakuwon yang menjadi kawasan elit pula.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang mendiami area perkampungan mengalami kesenjangan sosial. Dimana hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa wilayah sekitaran Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dihuni oleh kaum-kaum elit perkotaan. Pada beberapa tahun mendatang dikhawatirkan masyarakat perkampungan akan tersingkir dan wilayah kampung akan dikuasai oleh kaum elit dan yang memiliki kepentingan. Dilain sisi, kawasan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya juga diisi oleh restoran-restoran cepat saji atau fast food yang dapat menimbulkan tingginya tingkat konsumerisme masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mengalami konsumsi berlebihan dan menghabiskan uangnya untuk menuruti kemauan mereka masing-masing.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Tujuan menggunakan penelitian kualitatif ini agar dapat mengetahui gejala, fakta dan realita pada fenomena yang diteliti melalui berbagai sudut pandang ataupun tindakan yang dilakukan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada keadaan objek alamiah atau peneliti menjadi alat utama, hasilnya penelitian kualitatif lebih berfokus pada temuan dari fenomena yang dikaji dibandingkan generalisasi secara umum. Pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian yang dimana seorang peneliti mencari kejadian yang terdapat pada suatu kegiatan atau waktu tertentu dengan mengobservasi data atau informasi secara terstruktur dan mendalam.

Penelitian berlokasi di Kota Surabaya khususnya pada Kecamatan Wiyung dan sekitarnya. Fokus dari penelitian terletak pada bagaimana bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya setelah dilakukannya pembangunan kawasan elit. Adanya kesenjangan tersebut diawali dengan pembangunan area perumahan mewah, mall, dan restoran makanan cepat saji yang hingga saat ini menunjukkan perbedaan status sosial dari masyarakat yang menghuni wilayah tersebut. Timbulnya kesenjangan sosial ini dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan secara merata, hingga berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar yang berada pada kelas menengah kebawah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui observasi, sedangkan dalam data sekunder didapat melalui studi literatur dengan menggunakan buku, jurnal-jurnal dan artikel ilmiah sebagai referensi. Selanjutnya, peneliti mulai menganalisis data dari hasil observasi agar hasil dalam penelitian ini sesuai dengan realita lapangan dan keabsahan data tercapai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di wilayah perkotaan. Namun berdasarkan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, pembangunan infrastruktur kerap kali tidak berjalan secara merata. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat disekitar kampung perkotaan (Ibrahim, 2017). Secara umum penyebab ketidakmerataan pembangunan infrastruktur adalah kurangnya anggaran yang dikeluarkan oleh pihak terkait, sehingga pembangunan tidak terjadi secara merata. Permasalahan terkait dengan ketidakmerataan pembangunan dan kesenjangan sosial dari masyarakat kota tidak bisa dikesampingkan begitu saja, dan harus ada pendorong yaitu pembangunan ekonomi yang didalamnya memuat pembangunan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur tersebut dijadikan sebagai penunjang yang lebih

lengkap lagi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan peranan yang besar pada pertumbuhan sektoral, pusat aktivitas, dan peran lainnya (Yanuar, Dewi, Handayani, & Yuwanti, 2023).

Kesenjangan yang kerap kali dialami oleh masyarakat kota diantaranya dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain : aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek budaya (Farida & Andalas, 2019). Dengan melihat aspek tersebut, hal ini juga menjadi penyebab adanya perbedaan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat di wilayah perkotaan. Perbedaan pendapatan dari setiap individu yang ada di wilayah perkotaan menunjukkan status sosial yang berbeda antara satu sama lain. Kesenjangan sosial juga ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang tidak merata di wilayah perkotaan. Adapun alasan utama dilakukannya pembangunan infrastruktur terutama pada kota-kota besar adalah untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Namun apabila pembangunan hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, akan melahirkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat kota dan berujung pada terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya ketimpangan di Indonesia, yaitu perbedaan pembangunan dari infrastruktur wilayah (Sukwika, Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia, 2018). Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan, sekaligus kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat yang makmur, maka diperlukan adanya kemajuan dari infrastruktur yang memadai (Dies, 2015).

Pembangunan infrastruktur yang baik sangat diperlukan karena akan membantu proses pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat (Mulia Panjaitan, Mulatsih, & Rindayati, 2019). Namun berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tujuan awalnya sebagai bagian untuk mengurangi kesenjangan sosial justru tidak berjalan secara optimal. Banyak dijumpai adanya pembangunan infrastruktur yang tidak merata ini menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Sehubungan dengan ini, adanya pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan tenaga kerja yang ditawarkan oleh sektor-sektor terkait, Selain itu masyarakat asli yang mendiami wilayah setempat umumnya berstatus dari kelas sosial menengah kebawah. Di sisi lain, masyarakat pendatang yang status sosialnya menengah keatas banyak mendiami kawasan perumahan elit yang dibangun dengan berbagai macam infrastruktur yang baik. Karena biaya untuk mendiami kawasan elit cukup mahal dan membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu kawasan tersebut didiami oleh orang-orang yang berkecukupan dan juga para investor. Permasalahan terkait dengan kesenjangan sosial yang kerap kali terjadi pada masyarakat di Indonesia ini secara nyata terjadi di wilayah Kota Surabaya yang menjadi kota terbesar kedua setelah ibukota Jakarta.

Kota Surabaya khususnya di wilayah Surabaya Barat yaitu Kecamatan Wiyung dan sekitarnya mengalami permasalahan terkait dengan ketidakmerataan infrastruktur yang ada. Sehingga dengan adanya ketidakmerataan infrastruktur mengakibatkan perbedaan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Permasalahan ini disebabkan oleh pembangunan yang lebih pesat dilakukan pada kawasan elit dan berbanding terbalik dengan pembangunan di kawasan pemukiman masyarakat asli setempat. Dibuktikan dengan dibangunnya area elit seperti perumahan, *mall*, gerai *fast food*, apartement, dan perusahaan perusahaan elit lainnya. Sedangkan di wilayah tersebut juga terdapat perkampungan yang letaknya diapit oleh kawasan-kawasan elit ini. Pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan elit ini berjalan dengan baik karena telah dimiliki oleh para investor. Berbanding terbalik dengan area perkampungan yang dihuni oleh penduduk asli dengan kondisi wilayah yang sederhana.

Kawasan elit di wilayah tersebut dimiliki oleh para pebisnis maupun investor. Kawasan elit ini dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemiliknya maupun bagi publik. Sedangkan wilayah yang didiami oleh masyarakat kelas menengah kebawah akan dilakukan perbaikan apabila terdapat infrastruktur yang sudah tidak layak digunakan atau rusak. Dengan kondisi pembangunan infrastruktur publik yang tidak merata ini masyarakat di sekitar Kecamatan Wiyung

Surabaya mulai merasakan adanya ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat perkampungan dengan masyarakat yang mendiami kawasan perumahan elit. Gerai-gerai restoran cepat saji atau *fast food* juga dianggap sebagai penyedia makanan yang dikhususkan bagi kaum yang berada di kelas sosial atas. Adapun gerai-gerai fast food yang tersedia di wilayah tersebut antara lain : McDonalds, KFC, Richeese, Starbucks, Excelso, Burger King, Pizza Hut, dan gerai cepat saji lainnya.

Selain itu wilayah perkampungan juga diapit oleh kawasan perumahan elit seperti *Royal Residence*, apartement, dan Pakuwon. Hal inilah yang membuat masyarakat perkampungan khawatir di waktu yang akan datang wilayah perkampungan tergusur dan dikuasai oleh kaum elit tersebut. Melihat kondisi ini, jika dikaitkan dengan bahasa Karl Marx yang menunjukkan bahwa tanah mencerminkan relasi sosial dan produksi. Tanah dijadikan sebagai sumber keuntungan yang besar untuk mendukung kapitalis (Haekal, 2017). Dimana tanah yang ada di kawasan perkotaan banyak diinginkan oleh seluruh masyarakat dan diibaratkan sebagai suatu komoditas yang menguntungkan. Pada wilayah kota, terdapat aktor-aktor utama yang memiliki kekuatan besar dikota antara lain Birokrasi, Investor, dan Masyarakat. Jika melihat kondisi yang terjadi di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, tanah di wilayah tersebut banyak dimiliki oleh pihak investor. Sehingga kawasan Kecamatan Wiyung diubah dengan berbagai infrastruktur publik yang diutamakan bagi para kelas atas atau kaum elit tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan infrastruktur publik yang tidak merata di Kota Surabaya, memberikan dampak bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat yang berasal dari kelas atas dengan masyarakat kelas menengah kebawah. Tanah di wilayah Kota Surabaya, khususnya di daerah sekitaran Kecamatan Wiyung sebagian dikuasai oleh para investor. Sehingga tanah tersebut dibangun untuk dimanfaatkan sebagai ladang bisnis yang ditujukan untuk kaum kelas atas. Hal inilah yang membuat masyarakat yang ada di kawasan perkampungan menjadi khawatir jika mereka akan tersingkirkan dan wilayah mereka digantikan oleh para investor yang memiliki kepentingan pada beberapa tahun kedepan. Diharapkan pemerintah Kota Surabaya lebih peduli pada masyarakat yang ada di wilayah perkampungan agar kesenjangan sosial mampu teratasi dengan baik.

ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pambudi Handoyo dan Bapak Sugeng Harianto selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perkotaan yang membantu kami dalam proses pengerjaan artikel penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya karena telah membantu dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan sebagai bahan tambahan dari penulisan artikel penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu peneliti dalam proses penyampaian isi dari artikel penelitian ini.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- D. N. (2015). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dibidang Ekonomi . *Jurnal Heritage*, 33-48.
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer. *Kembara : Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarnya*, 75-76.

- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 36.
- Haekal, L. (2017, Agustus 14). *Kapitalisasi Hak Atas Tanah*. Retrieved 08 03, 2023, From Indoprogress.Com: <https://indoprogress.com/2017/08/kapitalisasi-hak-atas-tanah/>
- Hidayanti, I. (2021). Urbanisasi Dan Dampak Sosial Di Kota Besar Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 213.
- Ibrahim, H. R. (2017, Maret). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 6309.
- Mulia Panjaitan, H. A., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 44.
- Prasasty, B. H. (2021). Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Antara Indomaret Dan Pedangang Kaki Lima Di Kota Samarinda. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 63.
- Sadewo, F. S., & Legowo, M. (2019). *Respon Masyarakat Lokal Terhadap Pembangunan Di Jawa Timur*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 116-117.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 116-117.
- Undesa. (2021). In Situ Urbanization Key To Leaving No One Behind. *Dep Econ Soc Aff*, 1-7.
- Yanuar, M. A., Dewi, R. S., Handayani, W., & Yuwanti, S. (2023). Perkembangan Metropolitan Mamminasata: Tinjauan Kesenjangan Aspek Sosial-Ekonomi Dan Tata Kelola Wilayah. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 196.